

# **Breaking the Chain of Dependence: Community Empowerment and Decentralized Solutions for Education in Remote Indonesian Villages**

## **Memutus Rantai Ketergantungan: Pemberdayaan Komunitas dan Solusi Desentralisasi untuk Pendidikan di Desa Terpencil Indonesia**

Hamsah<sup>1\*</sup>, Rahmania Rahman<sup>2</sup>, Rizal<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

<sup>2</sup>Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received February 13, 2025

Revised April 28, 2025

Accepted May 05, 2025

#### Kata Kunci:

Kesenjangan Pendidikan; Desa Terpencil; Ketergantungan

#### Keywords:

Education Disparity; Isolated Villages; Dependency.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by PT Citra Media Publishing.

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena kurangnya akses pendidikan di Desa Beringin, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menjelaskan bagaimana ketergantungan pada pihak eksternal, seperti pemerintah pusat dan daerah, menciptakan ketidaksetaraan struktural yang menghambat pembangunan pendidikan di daerah terpencil. Fokus penelitian ini adalah SD Negeri Beringin, satu-satunya sekolah dasar di desa tersebut, yang memiliki fasilitas pendidikan yang sangat terbatas. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sekolah ini kekurangan ruang kelas yang memadai, buku pelajaran, dan tenaga pengajar. Selain itu, infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang sulit dijangkau, memperparah masalah aksesibilitas. Melalui metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan guru, orang tua, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumen kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan pada

kebijakan eksternal, kurangnya alokasi sumber daya, dan minimnya inisiatif lokal menjadi faktor utama masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### ABSTRACT

This research analyzes the phenomenon of lack of access to education in Beringin Village, Ranoyapo Sub-district, South Minahasa Regency, through the perspective of Dependency Theory. It focuses on explaining how dependence on external parties, such as the central and local governments, creates structural inequalities that hinder educational development in remote areas. The focus of this research is SD Negeri Beringin, the only primary school in the village, which has very limited educational facilities. Field observations show that the school lacks adequate classrooms, textbooks and teaching staff. In addition, poor infrastructure, such as hard-to-reach roads, exacerbates the accessibility problem. Through a qualitative method with data collection through observation, in-depth interviews with teachers, parents and community leaders, as well as a study of policy documents, this study found that dependence on external policies, lack of resource allocation and lack of local initiatives are the main factors of this problem. The results of this study are expected to inform the government and other stakeholders in formulating more inclusive and equitable education policies.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia dan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [hamsah@unima.ac.id](mailto:hamsah@unima.ac.id)

masyarakat. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengembangkan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (Fayzullin & Fayzullin, 2022; Upadhyay, 2022). Namun, di banyak daerah terpencil di Indonesia, akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan besar (Firdaus & Ritonga, 2024; Supianto et al., 2023). Salah satu contohnya adalah Desa Beringin, sebuah desa terpencil di Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Desa ini menghadapi masalah serius dalam hal akses pendidikan, yang tercermin dari kondisi SD Negeri Beringin 477, satu-satunya sekolah dasar di desa tersebut. SD Negeri Beringin 477 menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kekurangan ruang kelas, minimnya jumlah guru, hingga fasilitas belajar yang tidak memadai. Jalan menuju sekolah juga dalam kondisi buruk, sehingga menyulitkan siswa untuk hadir secara teratur. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses belajar-mengajar, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan struktural antara daerah terpencil dan pusat kekuasaan. Fenomena ini menjadi contoh nyata dari bagaimana ketergantungan pada pihak eksternal, seperti pemerintah pusat dan daerah, dapat memperparah ketimpangan akses pendidikan.

Isu ketimpangan akses pendidikan merupakan salah satu tantangan utama dalam mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketimpangan ini sering kali lebih mencolok di daerah terpencil dan tertinggal, di mana infrastruktur pendidikan dan sumber daya manusia terbatas (Wahyudiono, 2024). Menurut laporan UNESCO (2015), ketimpangan pendidikan sering kali terjadi di daerah terpencil dan tertinggal. Studi tersebut menekankan bahwa akses pendidikan yang tidak merata dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infrastruktur yang buruk, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Daerah yang terisolasi sering kali mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan (Cao, 2024; Nissa et al., 2024; Zheng et al., 2024). Studi oleh (Tang, 2023), menunjukkan bahwa daerah pedesaan dan terpencil cenderung memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini, termasuk jarak yang jauh ke sekolah, kurangnya transportasi, dan kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini menciptakan siklus ketidakadilan di mana anak-anak di daerah terpencil tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Di Indonesia, ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi. Penelitian oleh (Ahsan et al., 2020; Iskandar, 2022; Syahdan et al., 2024), mengungkapkan bahwa daerah pedesaan sering kali kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti sekolah yang layak, buku, dan alat bantu belajar. Selain itu, akses ke pendidikan tinggi juga sangat terbatas bagi siswa dari daerah terpencil, yang sering kali harus berpindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan mereka. Lebih lanjut, studi oleh (Sahrudin, 2024; Wahyuni et al., 2020) menemukan bahwa kebijakan pendidikan nasional di Indonesia sering kali tidak efektif dalam menjangkau daerah terpencil. Salah satu penyebab utama dari ketidakefektifan ini adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang diterapkan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi lokal, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari komunitas di daerah

terpencil.

Meskipun banyak penelitian telah membahas masalah akses pendidikan di daerah terpencil, beberapa celah penelitian masih perlu diatasi. Pertama, sebagian besar penelitian cenderung fokus pada aspek infrastruktur dan ketersediaan guru, tanpa menyelidiki akar masalah struktural yang mendasarinya, seperti ketergantungan pada pihak eksternal (Agtania et al., 2025; Patandung & Panggua, 2022; Tyas et al., 2024; Widyana et al., 2023; Winarsih et al., 2023). Kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan teoritis seperti teori ketergantungan masih terbatas, terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Teori ini, yang awalnya dikembangkan untuk memahami ketidaksetaraan ekonomi global (Liana et al., 2024; Windusancono, 2021), belum banyak diaplikasikan untuk menganalisis ketimpangan pendidikan di tingkat lokal. Ketiga, penelitian tentang pendidikan di daerah terpencil seringkali mengabaikan peran inisiatif lokal dan pemberdayaan masyarakat sebagai solusi alternatif. Padahal, inisiatif lokal dapat menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal dan meningkatkan akses pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis masalah akses pendidikan di Desa Beringin melalui perspektif Teori Ketergantungan, yang menyoroti ketidaksetaraan struktural dan ketergantungan pada pihak eksternal. Selain itu, penelitian ini menjelajahi peran inisiatif lokal dan pemberdayaan masyarakat sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan. Rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan relevan dengan konteks lokal juga disediakan untuk mendukung upaya peningkatan akses pendidikan. Berdasarkan latar belakang dan research gap di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya akses pendidikan di Desa Beringin menggunakan perspektif Teori Ketergantungan; dan kedua, memberikan rekomendasi kebijakan dan strategis untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan akses pendidikan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, desentralisasi kebijakan, dan kemitraan dengan LSM.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana Teori Ketergantungan menjelaskan fenomena kurangnya akses pendidikan di Desa Beringin? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketergantungan pada pihak eksternal dalam penyediaan pendidikan di Desa Beringin? Bagaimana inisiatif lokal dan pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi ketergantungan dan meningkatkan akses pendidikan? Penelitian ini menggunakan Teori Ketergantungan (Dependency Theory) sebagai kerangka teoretis. Teori ini berargumen bahwa daerah terpinggirkan (*periferi*) seringkali tergantung pada pusat kekuasaan (*core*) untuk sumber daya dan pembangunan. Ketergantungan ini menciptakan hubungan yang tidak setara, di mana daerah terpinggirkan dieksploitasi dan diabaikan (Ferraro, 2004; Ghosh, 2019; Kvangraven, 2020). Dalam konteks pendidikan, teori Ketergantungan dapat digunakan untuk memahami bagaimana ketergantungan pada pihak eksternal, seperti pemerintah pusat dan daerah, menghambat pembangunan pendidikan di daerah terpencil. Misalnya, kurangnya alokasi anggaran, kebijakan yang tidak relevan, dan minimnya perhatian dari pihak eksternal dapat memperparah ketidaksetaraan akses pendidikan.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini mengadaptasi Teori Ketergantungan dalam konteks pendidikan di Indonesia, yang masih jarang dilakukan dalam literatur sosiologi pendidikan. Kedua, secara empiris, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya akses pendidikan di Desa Beringin, termasuk ketergantungan pada pihak

eksternal dan minimnya inisiatif lokal. Ketiga, secara praktis, penelitian ini menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi upaya pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena kurangnya akses pendidikan di Desa Beringin, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi masalah akses pendidikan. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen.

Pertama, observasi dilakukan di SD Negeri Beringin dan lingkungan sekitarnya untuk memahami kondisi fisik sekolah, fasilitas pendidikan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap kondisi ruang kelas, ketersediaan alat belajar, dan infrastruktur pendukung seperti jalan menuju sekolah. Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses pendidikan (Sugiyono, 2014). Ketiga, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen kebijakan pendidikan, laporan pembangunan daerah, dan data statistik terkait pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pentingnya pemahaman konteks lokal dalam mengatasi ketimpangan pendidikan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan (Miles Matthew et al., 2014). Proses ini melibatkan pengkodean data dan pengelompokan informasi berdasarkan tema yang relevan, seperti infrastruktur pendidikan, kualitas pengajaran, dan kebijakan pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akses pendidikan di daerah terpencil.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan realitas yang ada di lapangan dan tidak bias (Miles Matthew et al., 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan Daerah**

Ketergantungan Desa Beringin pada pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan akses pendidikan di wilayah ini. SD Negeri Beringin, sebagai satu-satunya sekolah dasar di desa tersebut, menghadapi berbagai kendala akibat minimnya alokasi anggaran dan ketidakmerataan prioritas pembangunan. Salah satu bentuk ketergantungan yang paling mencolok adalah dalam hal penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan. Sekolah ini memiliki kondisi bangunan yang kurang layak, fasilitas belajar

yang terbatas, serta kekurangan tenaga pendidik. Hal ini terjadi karena alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah daerah yang masih belum memprioritaskan daerah terpencil seperti Desa Beringin. Seorang guru di SD Negeri Beringin mengungkapkan, "Kami telah beberapa kali mengajukan permohonan renovasi sekolah, namun tanggapannya selalu lambat dan tidak ada kepastian kapan bantuan akan datang."

Gambar 1. Kondisi Fasilitas SD Negeri Beringin



Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Selain itu, proses distribusi bantuan pendidikan sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang dan sistem administrasi yang tidak transparan. Beberapa bantuan yang dijanjikan, seperti penyediaan buku pelajaran dan alat tulis, tidak sampai tepat waktu atau jumlahnya tidak mencukupi untuk seluruh siswa. Ketergantungan terhadap mekanisme distribusi dari pemerintah pusat dan daerah ini semakin memperburuk kondisi pendidikan di desa karena sekolah tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Keterbatasan akses guru juga merupakan dampak nyata dari ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Rekrutmen guru di daerah terpencil seringkali mengalami kendala karena kebijakan distribusi tenaga pendidik yang kurang efektif. Guru yang ditempatkan di desa ini sering kali berasal dari luar daerah dan mengajukan mutasi setelah beberapa tahun bertugas, menyebabkan ketidakstabilan dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah SD Negeri Beringin menuturkan, "Setiap kali ada guru baru, mereka jarang bertahan lama. Setelah mendapatkan pengalaman beberapa tahun, mereka segera mengajukan mutasi ke daerah yang lebih berkembang. Ini membuat sekolah kami terus-menerus mengalami pergantian tenaga pendidik."

Gambar 2. Suasana Upacara Bendera



Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Dampak dari ketergantungan ini juga terlihat pada respons masyarakat terhadap berbagai permasalahan pendidikan. Karena kebijakan pendidikan di desa sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat cenderung pasif dan tidak memiliki ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kurangnya inisiatif lokal dalam mencari solusi atas permasalahan pendidikan menunjukkan bahwa ketergantungan ini telah mengakar dalam pola pikir masyarakat. Seorang warga desa menyatakan, "*Kami selalu menunggu bantuan datang karena kami tidak tahu bagaimana harus memperjuangkan pendidikan anak-anak kami sendiri.*"

Fenomena ini merupakan bentuk dominasi struktural di mana desa-desa terpencil ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap kebijakan yang dibuat di pusat pemerintahan. Desa Beringin menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan alokasi sumber daya antara pusat dan daerah dapat menciptakan kondisi ketimpangan pendidikan yang berkepanjangan. Tanpa adanya upaya serius untuk mendekentralisasi pengambilan keputusan dan memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah dan masyarakat lokal, maka kondisi ini akan terus berlanjut dan semakin memperdalam kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

### **Ketergantungan pada Kebijakan Eksternal**

Ketergantungan Desa Beringin terhadap kebijakan eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan stagnasi dalam pengembangan akses pendidikan. Kebijakan pendidikan yang bersifat top-down sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat lokal, sehingga implementasinya tidak efektif. Dalam konteks ini, Teori Ketergantungan (Dependency Theory) menjelaskan bahwa ketergantungan pada kebijakan yang ditentukan oleh aktor-aktor eksternal cenderung memperkuat ketimpangan dan menghambat kemandirian komunitas lokal.

Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian kurikulum nasional dengan kondisi lokal. Kurikulum pendidikan dasar yang diterapkan di SD Negeri Beringin mengikuti standar nasional tanpa adanya adaptasi terhadap konteks geografis dan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Seorang guru di SD Negeri Beringin mengungkapkan: "Anak-anak di sini sebenarnya lebih banyak terlibat dalam kegiatan pertanian dan perkebunan, karena mayoritas orang tua siswa adalah petani, tetapi materi pelajaran tidak memberikan keterampilan yang sesuai dengan kehidupan mereka. Akibatnya, mereka merasa kurang relevan dan sering kehilangan minat belajar."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kurikulum yang dirancang secara seragam di tingkat nasional kurang memperhitungkan karakteristik dan kebutuhan spesifik desa-desa terpencil seperti Desa Beringin. Hal ini kita dapat melihat bagaimana struktur kebijakan yang dibuat oleh pusat kekuasaan dapat menghambat perkembangan daerah pinggiran. Selain kurikulum, permasalahan lain yang muncul adalah terbatasnya akses terhadap program bantuan pendidikan. Kondisi ini mencerminkan bagaimana kebijakan eksternal yang dirancang untuk mendukung pendidikan justru memperburuk keadaan jika tidak diimplementasikan secara efisien. Ketidakstabilan alokasi dana ini menciptakan ketidakpastian dalam operasional sekolah, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa.

Kebijakan pendidikan nasional yang diterapkan di Desa Beringin tidak hanya kurang efektif tetapi juga memperparah ketergantungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah pusat dan daerah. Tanpa adanya ruang untuk adaptasi kebijakan yang lebih

fleksibel, desa ini akan terus berada dalam kondisi stagnasi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dalam perumusan kebijakan pendidikan, yang melibatkan masyarakat lokal untuk menentukan kebutuhan dan solusi yang sesuai dengan kondisi mereka.

### **Dampak Ketergantungan pada Pembangunan**

Ketergantungan yang terus-menerus terhadap pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pendidikan memiliki dampak luas terhadap pembangunan di Desa Beringin. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi aspek pendidikan secara langsung tetapi juga berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Teori Ketergantungan (Dependency Theory), ketergantungan yang diciptakan oleh kebijakan eksternal menghambat perkembangan mandiri komunitas lokal dan memperdalam kesenjangan antara pusat dan daerah pinggiran. Salah satu dampak yang paling nyata adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Ketidacukupan sarana dan prasarana di SD Negeri Beringin, seperti ruang kelas yang tidak memadai, kurangnya tenaga pendidik tetap, dan keterlambatan distribusi dana operasional, menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran. Seorang orang tua siswa mengungkapkan:

*"Anak-anak kami ingin belajar dengan baik, tetapi mereka sering kekurangan buku, tidak ada listrik yang stabil, dan gurunya sering berganti-ganti. Ini membuat mereka sulit fokus dan merasa pendidikan bukan sesuatu yang penting."*

Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di desa ini berimplikasi pada rendahnya motivasi belajar siswa. Dalam jangka panjang, generasi muda di Desa Beringin akan menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif. Dampak lain yang signifikan adalah kurangnya pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pendidikan yang tidak memadai menghambat peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka. Seorang tokoh masyarakat setempat menyatakan:

*"Kami ingin anak-anak kami bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi kalau pendidikan di sini tetap begini, mereka akan sulit bersaing dengan anak-anak dari daerah lain. Akhirnya, mereka hanya bisa bekerja di sektor informal atau tetap tinggal di desa dengan keterbatasan yang ada."*

Dalam konteks ini, masyarakat di daerah terpencil tetap berada dalam siklus kemiskinan struktural akibat kebijakan pembangunan yang tidak memperhitungkan faktor-faktor lokal. Ketidaksiapan tenaga kerja lokal akibat rendahnya akses pendidikan memperburuk ketimpangan regional dan semakin memperkokoh ketergantungan desa terhadap bantuan eksternal. Selain itu, ketergantungan pada pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan layanan pendidikan menciptakan pola pikir pasif dalam masyarakat. Masyarakat cenderung menunggu intervensi eksternal daripada berinisiatif mencari solusi lokal yang inovatif untuk meningkatkan pendidikan. Seorang guru di SD Negeri Beringin menuturkan:

*"Kami sering kali berharap ada bantuan dari pemerintah, tetapi kalau tidak datang, kami tidak bisa berbuat banyak. Padahal, mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan jika masyarakat lebih aktif terlibat."*

Pola pikir ini memperkuat ketidakberdayaan masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam pembangunan pendidikan mereka sendiri. Padahal, berbagai penelitian dalam pembangunan komunitas menunjukkan bahwa inisiatif lokal yang berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan ketergantungan terhadap kebijakan eksternal yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dampak ketergantungan ini juga terlihat dalam minimnya investasi jangka panjang dalam sektor pendidikan. Pemerintah daerah cenderung mengalokasikan dana pendidikan berdasarkan tekanan politik dan bukan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya.

Akibatnya, banyak sekolah di daerah terpencil seperti SD Negeri Beringin tetap berada dalam kondisi yang memprihatinkan tanpa ada perbaikan yang signifikan. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan di desa tetap rendah, yang pada akhirnya menghambat pembangunan manusia dan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengatasi dampak ketergantungan ini, diperlukan perubahan pendekatan dalam kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan, peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik lokal, serta alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan spesifik daerah harus menjadi prioritas. Hanya dengan mengurangi ketergantungan struktural dan meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan pendidikan, Desa Beringin dapat keluar dari siklus stagnasi pembangunan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

### **Modal Sosial dan Inisiatif Lokal**

Di tengah keterbatasan akses pendidikan di Desa Beringin, modal sosial dan inisiatif lokal menjadi faktor krusial yang dapat mendukung keberlanjutan pendidikan. Modal sosial merujuk pada jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, termasuk dalam sektor pendidikan. Dalam konteks ini, keberadaan modal sosial yang kuat dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih mandiri. Salah satu bentuk modal sosial yang terlihat di Desa Beringin adalah keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Sebagian besar orang tua sadar akan pentingnya pendidikan, meskipun mereka menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas sekolah dan tenaga pengajar. Seorang warga desa mengungkapkan:

*"Kami tahu pendidikan itu penting, makanya meskipun sekolah di sini kurang fasilitas, kami tetap berusaha mendukung anak-anak belajar di rumah. Kadang kami juga gotong royong memperbaiki sekolah jika ada yang rusak."*

Gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat mencerminkan adanya bentuk solidaritas sosial yang dapat menjadi dasar untuk membangun inisiatif lokal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Keterlibatan komunitas dalam perbaikan sekolah, penyediaan bahan ajar secara mandiri, serta inisiatif membentuk kelompok belajar alternatif merupakan bentuk nyata dari modal sosial yang dapat dikembangkan lebih

lanjut. Selain itu, peran guru dan tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dalam memanfaatkan modal sosial yang ada. Beberapa guru di SD Negeri Beringin berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang terbatas dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan berbasis pada kearifan lokal. Salah seorang guru menuturkan:

*"Kami sadar kurikulum nasional kurang relevan dengan kondisi di sini, jadi kami mencoba menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, misalnya menggunakan contoh-contoh dari lingkungan mereka sendiri."*

Inovasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik ini menunjukkan bahwa dengan adanya kreativitas dan kepedulian dari individu-individu di dalam komunitas, pendidikan tetap dapat berjalan meskipun dalam keterbatasan. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan eksternal, tetapi juga pada bagaimana komunitas lokal dapat mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, inisiatif lokal ini masih menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah kurangnya dukungan kebijakan yang mendorong kemandirian dalam pendidikan di daerah terpencil. Banyak program pemerintah masih bersifat top-down dan kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan:

*"Kami punya banyak ide untuk meningkatkan pendidikan di desa ini, tapi sering kali sulit karena kebijakan datang dari atas tanpa mempertimbangkan kondisi di sini. Kami butuh lebih banyak kebebasan untuk mengelola pendidikan kami sendiri."*

Pentingnya modal sosial dan inisiatif lokal dalam pembangunan pendidikan di Desa Beringin menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dapat menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan, baik melalui pemberian dana desa yang lebih fleksibel untuk pendidikan, pelatihan bagi tenaga pengajar lokal, maupun penyediaan platform untuk berbagi praktik terbaik antar komunitas di daerah terpencil. Dengan memperkuat modal sosial dan mendorong inisiatif lokal, masyarakat Desa Beringin dapat mulai membangun sistem pendidikan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga tentang membangun kesadaran bahwa pembangunan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat.

## **Pembahasan**

Desa Beringin menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah, pengadaan fasilitas belajar, dan rekrutmen guru. Ketergantungan ini sering kali tidak diimbangi dengan alokasi sumber daya yang memadai, menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan. Sebagai contoh, SD Negeri Beringin mengalami kekurangan ruang kelas dan fasilitas dasar seperti perpustakaan dan laboratorium. Hal ini mencerminkan fenomena di mana pusat kekuasaan cenderung mengabaikan kebutuhan daerah terpinggirkan, sehingga memperparah ketimpangan akses pendidikan (Sihombing, 2023; Sofiani et al., 2024). Kebijakan pendidikan nasional seringkali dirumuskan tanpa mempertimbangkan konteks lokal daerah terpencil seperti Desa Beringin. Contohnya, kurikulum nasional

mungkin tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Selain itu, program bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seringkali tidak sampai ke desa terpencil karena hambatan birokrasi dan geografis. Ketergantungan pada kebijakan eksternal yang tidak relevan ini memperburuk masalah akses pendidikan.

Desa Beringin sangat bergantung pada pemerintah pusat dan daerah untuk penyediaan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pengadaan fasilitas belajar, dan rekrutmen guru. Ketergantungan yang berkelanjutan pada pihak eksternal telah menciptakan mentalitas ketergantungan di kalangan masyarakat Desa Beringin. Masyarakat cenderung menunggu bantuan dari pemerintah atau pihak luar daripada mengembangkan inisiatif lokal untuk menyediakan pendidikan. Misalnya, tidak ada upaya serius dari masyarakat untuk mendirikan sekolah swadaya atau program pendidikan alternatif. Hal ini menunjukkan bagaimana ketergantungan pada pihak eksternal dapat menghambat kemandirian dan inovasi lokal (Geornes & Abdullah, 2025; Lellola et al., 2023). Penelitian oleh (Akmalia et al., 2021) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Ketergantungan pada pihak eksternal tidak hanya menghambat akses pendidikan, tetapi juga berdampak pada pembangunan manusia dan ekonomi di Desa Beringin. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai akan kesulitan untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang berkelanjutan, di mana masyarakat desa tetap terpinggirkan dan tidak mampu mengubah kondisi mereka sendiri.

Meskipun Teori Ketergantungan menekankan pada masalah ketergantungan, teori ini juga membuka ruang untuk solusi berbasis masyarakat. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui program pelatihan dan pendampingan dapat mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Selain itu, desentralisasi kebijakan pendidikan dapat memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka (Lellola et al., 2023; Sofiani et al., 2024). Kemitraan dengan LSM atau organisasi non-pemerintah juga dapat menjadi solusi alternatif untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan (Khalil & Syah, 2024)

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Ketergantungan suatu daerah pada pemerintah pusat dan daerah dalam hal penyediaan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pengadaan fasilitas belajar, dan rekrutmen guru seringkali menimbulkan tantangan yang signifikan. Ketergantungan ini kadang tidak diimbangi dengan alokasi sumber daya yang memadai, yang mengakibatkan kesenjangan dalam akses pendidikan, seperti yang terlihat pada SD Negeri Beringin yang kekurangan ruang kelas dan fasilitas dasar seperti perpustakaan dan laboratorium. Kebijakan pendidikan nasional yang tidak mempertimbangkan konteks lokal daerah terpencil, ditambah dengan hambatan birokrasi dan geografis, semakin memperburuk ketimpangan ini. Ketergantungan yang berkelanjutan pada pihak eksternal juga menciptakan mentalitas ketergantungan di kalangan masyarakat Desa Beringin, yang lebih cenderung menunggu bantuan dari pemerintah atau pihak luar daripada mengembangkan inisiatif lokal untuk menyediakan pendidikan. Hal ini menghambat kemandirian dan inovasi lokal yang dapat mengatasi masalah akses pendidikan. Dampak lebih jauh dari ketergantungan ini adalah terciptanya siklus kemiskinan dan

ketergantungan yang menghambat pembangunan manusia dan ekonomi di desa. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai akan kesulitan bersaing di tingkat regional atau nasional, memperparah kondisi kemiskinan dan keterbatasan sumber daya di desa.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, pemberdayaan masyarakat lokal melalui program pelatihan dan pendampingan dapat mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal dan menciptakan inisiatif lokal dalam penyediaan pendidikan. Kedua, desentralisasi kebijakan pendidikan perlu diperkuat untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Desentralisasi ini akan memungkinkan kebijakan pendidikan yang lebih relevan dan efektif di daerah terpencil. Ketiga, kemitraan dengan LSM atau organisasi non-pemerintah dapat menjadi solusi alternatif dalam menyediakan sumber daya dan dukungan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kualitas pembelajaran di Desa Beringin. Terakhir, penyesuaian kurikulum pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, terutama di sektor pertanian, akan memastikan bahwa pendidikan di Desa Beringin lebih kontekstual dan dapat membantu anak-anak desa untuk menghadapi tantangan di masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agtania, A. Z., Robinson, N. A., Nawali, W., & Firmantika, L. (2025). Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil (Riau). *Jurnal Pendidikan*, 34(1), 35–40.
- Ahsan, N., Emran, M., & Shilpi, F. (2020). The Rural-Urban Divide and Intergenerational Educational Mobility in a Developing Country: Theory and Evidence from Indonesia. *Labor: Human Capital EJournal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3676626>
- Akmalia, H. A., Indraswati, D., & Polonia, B. S. E. (2021). Pendampingan Pembelajaran Daerah Terpencil di SD Negeri 1 Tumbang Kuling Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(2), 243–252. <https://doi.org/10.29407/ja.v5i2.15267>
- Cao, R. (2024). Research on Educational Inequality among Students in Poverty-stricken Areas in China. *Transactions on Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.62051/4q8g3073>
- Fayzullin, F. S., & Fayzullin, I. F. (2022). The Role Of The Education System In The Development Of Human Capital. *Izvestia Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN*, 0(4), 107–111. <https://doi.org/10.31040/2222-8349-2022-0-4-107-111>
- Ferraro, V. (2004). *Dependency Theory: An Introduction*. <https://consensus.app/papers/dependency-theory-an-introduction-ferraro/fa2f30a7f6a7538381aca419ca628bce/>
- Firdaus, K., & Ritonga, M. (2024). Peran Teknologi Dalam Mengatasi Krisis Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 9(1), 43–57. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i1.303>
- Geornes, R., & Abdullah, Z. (2025). Anak Petani Tidak Ingin Jadi Petani (Studi di Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 2(2), 73–80. <https://doi.org/10.69875/djosse.v2i2.130>
- Ghosh, B. (2019). *Dependency Theory Revisited*. <https://doi.org/10.4324/9781315187389>
- Iskandar, K. (2022). Melihat Kembali Potret Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Religious Studies*. <https://doi.org/10.57060/jers.v2i02.68>

- Khalil, K., & Syah, R. (2024). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6), 3448–3457. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15410>
- Kvangraven, I. (2020). Beyond the Stereotype: Restating the Relevance of the Dependency Research Programme. *Development and Change*. <https://doi.org/10.1111/dech.12593>
- Lellola, I., Keipau, D., Ngilamele, N., Louk, R., Peraso, A., Koupun, R., Tetiwar, V., Kelmaskosu, J., Unawekla, R., Sairdola, W., Rumtutuly, F., & Alam, A. (2023). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Bimbingan Belajar Di Dusun Nyama. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(3), 279–285. <https://doi.org/10.59025/js.v2i3.108>
- Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, A., Judijanto, L., Wartono, T., Suharto, S., Fitriyana, F., & Hariyono, H. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Miles Matthew, B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Nissa, I. A., Masrukin, & Mutahir, A. (2024). Kemerdekaan Pendidikan Anak Pedalaman (Analisis Semiotika Tentang Pendidikan Yang Membebaskan Dalam Film Sokola Rimba (2013). *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.200>
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis masalah-masalah pendidikan dan tantangan pendidikan nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805.
- Sahrudin, S. (2024). MITOS KESEMPATAN SETARA DAN REPRODUKSI KETIMPANGAN SOSIAL. *Wulang: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*. <https://doi.org/10.55656/wjp.v1i2.299>
- Sihombing, R. (2023). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *PARAHYANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT REVIEW*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supianto, S., Marmoah, S., Poerwanti, J. I. S., Istiyati, S., Mahfud, H., & Sukarno, S. (2023). Comparative Study of Education Equity Policy in Remote Areas in Indonesia and Malaysia. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), 125–134. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v19i2.2866>
- Syahdan, Muh., Hakim, Moh. A., & Hamzah, E. I. (2024). PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA PADA MATA PELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 4 SIGI. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 2(1), 62–72. <https://doi.org/10.69875/djosse.v2i1.152>
- Tang, X. (2023). Educational Inequality Between Urban and Rural Areas in China. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/30/20231736>
- Tyas, A. C., Maheswari, N. P., & Aprilia, R. D. (2024). Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil: Problematika Pendidikan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 1020–1026.
- Upadhyay, A. (2022). A study on the Role of Education in various facets of Human Development. *International Journal of Management and Development Studies*, 11(05), 13–16. <https://doi.org/10.53983/ijmds.v11n05.003>
- Wahyudiono, A. (2024). PERAN PROGRAM BANYUWANGI MENGAJAR DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *KATARSIS*, 1(3), 58–68. <https://doi.org/10.62734/kts.v1i3.284>

- Wahyuni, Dan, & Monika. (2020). *Exploring The Relationship Between Education Attainment And The Urban–Rural Households Expenditure Inequalities Case Study: Indonesia 2015-2018*. <https://consensus.app/papers/exploring-the-relationship-between-education-attainment-wahyuni-dan/8e7b055d125352c7a420a7d9a05db73c/>
- Widyana, A., Puspitasari, E., Kusumawati, N. I., & Sutrisno, Z. (2023). THE EFFECT OF EQUALIZING EDUCATION QUALITY ON STUDENT LEARNING OUTCOMES IN FRONTIER, OUTERMOST, AND LEAST DEVELOPED AREAS (3T). *ISLLAC: Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture*. <https://doi.org/10.17977/um006v7i12023p65-72>
- Winarsih, N., Musliha, S., Septiana, W., & Faize, S. N. (2023). ANALISIS PERSPEKTIF GURU DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DAN DAMPAKNYA PADA PEMBELAJARAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i2.102>
- Windusancono, B. A. (2021). Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 18(1), 89–105.
- Zheng, Z., Jiang, S., & Cui, R. (2024). Remote Learning and Educational Inequality. *Production and Operations Management*, 33(12), 2421–2439. <https://doi.org/10.1177/10591478241272084>